



TRAGEDI MINA DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

Sita Hidriyah*)

Abstrak

Tragedi Mina yang menelan korban jiwa lebih dari 1000 jemaah haji telah menjadi keprihatinan dunia. Di pihak jemaah haji Indonesia tercatat lebih dari 100 orang menjadi korban meninggal dunia dalam musibah tersebut. Muncul keinginan untuk penyelidikan independen dengan melibatkan negara-negara yang jemaahnya menjadi korban untuk mencari kebenaran tentang penyebab kejadian sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi menempuh kebijakan investigasi tertutup. Arab Saudi menolak intervensi investigasi tragedi Mina dan meminta semua pihak bersabar menunggu hasil investigasi.

Pendahuluan

Tragedi Mina yang menelan korban jiwa lebih dari 1000 jemaah dari berbagai belahan dunia itu disebut sebagai tragedi terburuk dalam 25 tahun terakhir penyelenggaraan haji oleh Pemerintah Arab Saudi. Selama ini Pemerintah Arab Saudi terus berusaha untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan jemaah. Perbaikan-perbaikan telah dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan bagi anggota jemaah haji, seperti perluasan Masjidil Haram, pembangunan tujuh lantai jalur untuk melempar jumrah, hingga penyiapan kereta cepat Makkah-Jeddah-Madinah. Namun demikian, peristiwa

kecelakaan di Mina lagi-lagi memunculkan pertanyaan tentang standar keamanan dan kebijakan Pemerintah Arab Saudi dalam pelayanan ibadah haji. Akibatnya, Pemerintah Arab Saudi mendapat tekanan dari banyak pihak untuk melakukan investigasi terbuka dan perbaikan manajemen pengelolaan jemaah haji.

Pemerintah Arab Saudi dinilai bertindak tertutup soal investigasi. Musibah yang terjadi menimpa banyak korban dari banyak negara tersebut menimbulkan keinginan negara korban untuk dapat dilibatkan dalam proses investigasi. Terkait proses investigasi, Arab Saudi menegaskan

*) Peneliti Muda Masalah-masalah Hubungan Internasional, pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: sita.hidriyah@dpr.go.id



bahwa mereka tidak ingin diintervensi oleh pihak manapun. Negara tersebut tidak mengikutsertakan negara lain di dalam proses investigasi dan membatasi keterlibatan negara lain hanya sebatas pemberian saran. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan peringatan bahwa mereka tidak akan mengizinkan pihak mana pun mengeksploitasi haji untuk kepentingan politik. Hal ini tentu saja merupakan tantangan besar bagi Arab Saudi karena jemaah haji berasal dari 200 negara di seluruh dunia.

Reaksi Negara-Negara Korban Menyikapi Tragedi Mina

Muncul usulan untuk melakukan investigasi *independent* dengan mengatasnamakan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Keterlibatan OKI dinilai wajar sebagai perwujudan kepedulian, profesionalitas dan keterlibatan dunia Islam dalam pengelolaan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Selain agar kinerja Pemerintah Arab Saudi menjadi lebih ringan, kerja sama ini adalah bentuk dari tanggung jawab bersama sebagai persatuan umat Islam. Apabila OKI dapat melaksanakan investigasinya, diharapkan tidak akan ada pihak yang mengambil keuntungan dari pelaksanaan haji. Namun demikian, tidak semua kalangan setuju dengan keterlibatan OKI pada investigasi tragedi Mina. Tindakan tersebut dinilai banyak kalangan tidaklah perlu karena penanganan tragedi tersebut bukan bersifat politik. Penanganan musibah harus lebih kepada rasa kemanusiaan dengan mengatasnamakan negara Islam yang peduli dengan musibah yang terjadi dan terhadap perbaikan penyelenggaraan haji ke depan. Apabila melibatkan OKI secara organisasi, dikhawatirkan akan muncul banyak persoalan. Selain politis, juga adanya perbedaan paham dan pandangan yang dapat menimbulkan pertengkaran dalam proses investigasi. Dengan demikian, hal itu akan mengganggu proses yang berlangsung serta pada kesempurnaan haji.

Iran merupakan negara yang bereaksi paling keras terhadap tragedi Mina dan menganggap Negara Arab Saudi luput menangani keselamatan anggota jemaah

haji. Korban terbanyak berasal dari Iran, diperkirakan lebih dari 150 jemaah Iran meninggal dalam tragedi itu. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menuntut Pemerintah Arab Saudi meminta maaf kepada seluruh keluarga korban dan bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Iran menyerukan negara-negara Islam membentuk komite investigasi bersama untuk menyelidiki tragedi tersebut. Merespons tuduhan itu, Negara Arab Saudi menilai reaksi Iran bermuatan politik akibat dari perselisihan kedua negara pada krisis regional Suriah dan Yaman.

Maroko dengan jumlah korban 87 orang meninggal menjadi negara dengan korban terbanyak kedua setelah Iran, menggelar aksi demo secara damai dengan mengemukakan kesalahan manajemen dan kecerobohan penyelenggaraan manasik haji Arab Saudi. Sejumlah aktivis politik dan HAM Maroko menegaskan Arab Saudi untuk bertanggung-jawab penuh atas tragedi Mina, menyerukan pembentukan investigasi internasional yang independen dan mempublikasikan secara transparan penyebab insiden itu. Maroko juga menuntut kerajaan Arab Saudi sebagai penyelenggara haji untuk meminta maaf kepada keluarga korban dan membayar uang *diat* (denda).

Indonesia yang menjadi negara dengan jumlah jemaah haji terbesar bersikap menunggu hasil investigasi Arab Saudi. Berbeda dengan Iran yang cenderung menyalahkan Arab Saudi, Indonesia menyikapi terjadinya bencana dengan lebih rasional dan bijaksana berikut pemberian saran bagi perbaikan ibadah haji ke depan. Pemerintah Indonesia juga meminta Pemerintah Arab Saudi untuk menerima masukan dari negara-negara yang warganya menjadi korban dalam membenahi manajemen haji. Pemerintah Arab Saudi menerima tawaran bantuan tim ahli identifikasi jenazah dari Pemerintah Indonesia.

Kerja Sama Internasional

Arab Saudi telah melakukan mitigasi *hazard* dalam bentuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur ibadah haji. Meskipun demikian, hal ini tetap

memberikan tingkat kesulitan tersendiri dan harus mendapatkan perhatian yang lebih besar karena pengelolaan haji melibatkan jutaan jemaah dengan sikap, perilaku, bahasa, suku bangsa dan adat istiadat yang beraneka ragam. Koordinasi antar-negara harus ditingkatkan, dilakukan pembenahan manajemen dan disosialisasikan ke berbagai negara muslim. Pemerintah Arab Saudi harus melakukan investigasi tragedi Mina dengan membentuk tim multinasional melibatkan ahli dari berbagai negara, terutama negara yang warganya menjadi korban. Tujuan investigasi harus dititikberatkan pada perbaikan sistem.

Presiden Jokowi meletakkan perlindungan WNI sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negerinya. Upaya perlindungan WNI di luar negeri, termasuk WNI yang tengah melakukan ibadah haji. Karena itu, Pemerintah Indonesia hendaknya terlibat dalam upaya perbaikan sistem haji yang dilakukan Arab Saudi karena Indonesia adalah negara pengirim haji terbesar. Pemerintah Indonesia harus memiliki kebijakan antisipasi untuk melindungi keselamatan jemaah Indonesia. Hal tersebut akan mudah dilaksanakan bila mempunyai hubungan bilateral yang baik dengan Arab Saudi.

Dalam penanganan ibadah haji selama ini posisi tawar (*bargaining position*) pemerintah Indonesia terhadap Arab Saudi masih dinilai lemah dan masih kalah ketimbang negara-negara lain. Peningkatan posisi tawar terhadap Arab Saudi perlu dilakukan demi meningkatkan pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia. Lemahnya posisi tawar terlihat dari masih ditematkannya sebagian jemaah berada jauh di Mina Jadid saat mereka bermalam di Mina. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia harus lebih aktif melakukan negosiasi secara sejajar dengan pemerintah Arab Saudi dalam hal permasalahan haji. Mengapa demikian? Jemaah haji Indonesia dinilai lebih disiplin dan relatif lebih mudah diatur dibandingkan dengan jemaah haji dari negara-negara lain. Hal ini seharusnya dapat menjadi keunggulan perbandingan perilaku jemaah Indonesia dengan jemaah negara lain dalam bernegosiasi dengan Arab Saudi.

Untuk mengoptimalkan upaya diplomasi seperti ini, Pemerintah Indonesia misalnya, dapat memanfaatkan tokoh-tokoh agama Indonesia yang memiliki hubungan sangat baik dengan pihak Arab Saudi melalui instrumen *second track diplomacy* (diplomasi jalur kedua). Diplomasi yang bersifat informal ini dapat melengkapi dan memperkuat negosiasi pemerintah. Dalam konteks kekiniaan, cara diplomasi seperti ini bukan hanya menjadi sangat penting dan strategis melainkan juga memiliki urgensi yang tinggi.

Penutup

Berbagai kalangan, terutama para pemangku kepentingan, mendesak agar tragedi Mina 2015 dijadikan momentum untuk membenahi penyelenggaraan ibadah haji. Perbaikan hendaknya dilakukan oleh semua pihak yang berperan dalam ibadah itu, yaitu Pemerintah Arab Saudi, pemerintah dari negara-negara asal jemaah, termasuk Indonesia, dan para anggota jemaah itu sendiri. Pemerintah Indonesia, khususnya Kemlu diminta untuk memperbaiki posisi tawar Indonesia terhadap Arab Saudi agar pelayanan kepada anggota jemaah Indonesia selama menjalani semua tahapan ibadah semakin baik.

Dalam kerangka ini, DPR RI perlu memberikan dukungan dan sekaligus mengawal upaya diplomasi Pemerintah Indonesia untuk berkontribusi penuh dalam mencari solusi atas tragedi tersebut. Arti pentingnya upaya ini karena penyelenggaraan ibadah haji tahunan ini merupakan ritual besar yang memiliki dampak ekonomi yang tidak sedikit bagi negara-negara berkembang. Oleh karena itu, kiranya sudah waktunya negara-negara yang berkepentingan dalam penyelenggaraan ibadah haji khususnya negara-negara dengan penduduk Islam besar agar permasalahan haji dapat dikelola secara baik. Dalam jangka pendek, negara-negara tersebut dapat turut mendesak Pemerintah Arab Saudi untuk menyelesaikan penyelidikan secara tuntas sehingga tingkat kepercayaan kepada Arab Saudi akan dapat terjaga.

Referensi

- “Safety Manager’ Pelaksanaan Ibadah Haji”, *Republika*, 7 Oktober 2015
- “Arab Saudi Terima Bantuan RI”, *Kompas*, 2 Oktober 2015.
- “Umat Islam dan Second Track Diplomacy”, *Republika*, 5 Oktober 2015.
- “DPR: Perkuat Posisi Tawar dengan Saudi”, *Republika*, 5 Oktober 2015.
- “Masih 500 Jenazah Belum Dirilis Identitasnya”, *Republika*, 1 Oktober 2015.
- “RI Diminta Tingkatkan Posisi Tawar”, *Republika*, 1 Oktober 2015.
- “Arab Ditekan untuk Tingkatkan Upaya Keselamatan Haji”, <http://www.tribunnews.com/internasional/2015/09/25/arab-ditekan-untuk-tingkatkan-upaya-keselamatan-haji>, diakses tanggal 2 Oktober 2015.
- “DPR Usul Pemerintah Investigasi Tragedi Mina Secara Mandiri”, <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/28/14460181/DPR.Usul.Pemerintah.Investigasi.Tragedi.Mina.secara.Mandiri>, diakses tanggal 30 September 2015.
- “Khamenei: Dunia Islam Harus Turut Investigasi Tragedi Mina”, <http://international.sindonews.com/read/1049326/43/khamenei-dunia-islam-harus-turut-investigasi-tragedi-mina-1443613349>, diakses tanggal 1 Oktober 2015.
- “Iran Ancam Balas Saudi jika Jasad Tragedi Mina Tak Dipulangkan”, <http://international.sindonews.com/read/1049476/43/iran-ancam-balas-saudi-jika-jasad-tragedi-mina-tak-dipulangkan-1443670784>, diakses tanggal 1 Oktober 2015.
- “Korban Wafat Terbanyak Tragedi Mina Asal Iran dan Maroko”, <http://international.sindonews.com/read/1048154/43/korban-wafat-terbanyak-tragedi-mina-asal-iran-dan-maroko-1443246298>, diakses tanggal 6 Oktober 2015.
- “Soal Mina, Arab Saudi Sambut Baik Bantuan Indonesia”, <http://www.antaranews.com/berita/520783/soal-mina-arab-saudi-sambut-baik-bantuan-indonesia>, diakses tanggal 30 September 2015.
- “Tragedi Mina, Bisakah Dicegah?”, <http://internasional.kompas.com/read/2015/09/26/15320501/Tragedi.Mina.Bisakah.Dicegah>, diakses tanggal 1 Oktober 2015.
- “Tragedi Mina Pelajaran Untuk Semua”, <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/30/11382171/Tragedi.Mina.Pelajaran.untuk.Semua?page=3>, diakses tanggal 30 September 2015.